



## Tata Ulang Prioritas APBD

# Tata Ulang Prioritas APBD

**MAKASSAR, FAJAR** — Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulsel harus ditata ulang. Prioritas harus dipetakan untuk mencapai fiskal yang sehat.

Dalam dua tahun terakhir, Pemprov Sulsel keteteran dalam situasi fiskal yang tidak sehat. Tahun anggaran 2024 ini, pembangunan infrastruktur tidak jadi prioritas. Sebab, Pemprov harus melunasi utang konstruksi sekira Rp300 miliar.

APBD yang luntang-lantung ini membuat akselerasi pembangunan menurun. Sehingga, Pemprov perlu meracik ulang tata kelola dan prioritas penggunaan APBD Rp10 triliun.

Pemprov Sulsel bersama DPRD Sulsel saat ini dalam periode pemba-

•• Baca Tata... Hlm 11

# Tata Ulang Prioritas APBD

•• Lanjutan Halaman... 9

hasan APBD Perubahan dan rancangan APBD TA 2025.

Anggota Badan Anggaran DPRD Sulsel, Andi Januar Jaury mengatakan, ada mandatori pusat dalam pengelolaan APBD. Rinciannya, belanja pegawai maksimal 30 persen, sektor pendidikan 20 persen, infrastruktur layanan 40 persen, dan sektor kesehatan 10 persen.

Dengan adanya mandatori ini, maka Pemprov Sulsel harus memastikan prioritas penganggaran untuk mencapai fiskal yang sehat. Misalnya, inventarisasi program-program kegiatan di sisa tahun ini yang harus ditunda

pengerjaannya.

"Hampir terjadi di semua OPD. Sehingga ini kerja keras BKAD untuk penyesuaian alur kas di sisa beberapa bulan di TA 2024 ini," ujar Andi Januar, Rabu, 11 September.

Ia membeberkan, belanja pegawai seperti hak gaji dan tambahan penghasilan harus jadi prioritas. Ia ingin memastikan di sisa bulan TA 2024 ini semua belanja pegawai terakomodasi.

"Apapun bentuknya, belanja pegawai harus wajib diselesaikan. Sehingga momentum (APBD) Perubahan menjadi media untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian," tukas Legislator Fraksi Demokrat ini.

Andi Januar membe-

berkan, tata kelola keuangan menuju APBD sehat ini sudah dimulai tahun ini dan ditargetkan menunjukkan hasil pada TA 2026. Sehingga untuk mencapai itu, alur kas tahun 2025 diperkirakan tidak jauh berbeda dengan tahun ini.

Prioritas belanja pegawai, pembayaran sisa utang, dan penyesuaian sektor infrastruktur. Penyesuaian dibutuhkan untuk menyeimbangkan antara prioritas dengan kebutuhan belanja yang telah diamankan Undang-undang.

"Kemampuan fiskal ini rupa-rupanya memang masih berat sekali kita temukan komposisi yang tepat. Karena beban-beban di tahun sebelumnya terus mengikuti,

sehingga terjadi penundaan-penundaan realisasi pembayaran hak-hak pegawai," tandasnya.

Pelaksana Harian Kepala Bappelitbangda Sulsel, Andi Bakti Haruni mengutarakan, untuk mencapai APBD sehat itu memang perlu penyesuaian prioritas. Namun ia menepis bahwa pembangunan infrastruktur sama sekali tidak akan jadi pilihan.

"Bukan mengurangi pembangunan, memprioritaskan kegiatan. Pertama pelayanan tetap dilaksanakan, infrastruktur juga tetap melalui pemeliharaan. Untuk perkembangan perluasan mungkin tidak jadi pilihan utama," terang Kepala Dinas Perkimtan Sulsel ini. (uca/yuk)